

**AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR  
DI SEKOLAH DASAR NEGERI PATI KIDUL 01  
KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI**

**PUBLIKASI TESIS**



**OLEH :**

**Nama : AMBAR WIDIANINGTYAS  
NIM : Q 100050128  
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan  
Konsentrasi : Manajemen Sistem Pendidikan**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2006**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hubungan perkembangan zaman dengan mutu pendidikan saat ini dalam Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan yang dikemukakan oleh Syafaruddin (2002 :11 ) yaitu:

Besarnya tantangan terhadap masa depan di era globalisasi, tampaknya dunia pendidikan kita masih kurang siap. Berdasarkan laporan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berkedudukan di Hongkong, sebagaimana dimuat dalam The Jakarta Post (Vol. 19 No.127:2001), diungkapkan bahwa sistem pendidikan Indonesia adalah yang terburuk di Asia. Mutunya dengan skor 6.21, dan negara-negara tetangga di Asia. Pendidikan nasional Indonesia hanya mendapat tingkat 12 di bawah Vietnam, sedangkan rangking pertama adalah Korea Selatan.

Mutu pendidikan yaitu suatu pendidikan yang menghasilkan out put yang cerdas dan kompetitif. Mutu pendidikan merupakan konsekuensi langsung dari suatu perubahan dan perkembangan berbagai aspek kehidupan.

Untuk membangun pendidikan yang berkualitas di sekolah menghadapi banyak kendala antara lain : 1) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih sangat rendah, karena terlalu kuatnya dominasi pemerintah pusat dalam manajemen mikro penyelenggaraan pendidikan; 2) penggunaan sumber daya tidak optimal dan tidak efisien dikarenakan rendahnya anggaran pendidikan dan sistem pengelolaan anggaran yang terpusat; 3) partisipasi masyarakat yang masih rendah padahal secara historis peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Indonesia sangat besar; 4) sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannya (Nurkolis, 2003).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pasal 48 tentang Pengelolaan Dana Pendidikan, ayat 1 berbunyi “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisien, transparansi dan akuntabilitas publik”. Selain itu Menteri Pendidikan Nasional juga membuat peraturan yang jelas dan rinci terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Sehingga dengan kaitan

ini, pemerintah mewajibkan seluruh sekolah membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) serta pengelolaannya.

Akuntabilitas dalam arti sekolah dituntut memberi tanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan misi dan fungsi pendidikan. Akuntabilitas dimaksudkan bukan saja terbatas pada masalah fisik dan keuangan namun lebih dari itu meliputi kesesuaian tujuan pendidikan dengan falsafah moral dan etika. Pada era desentralisasi, otonomi dan keterbukaan ini, semua pihak tentunya sepakat bahwa akuntabilitas publik itu penting. Dengan demikian institusi pendidikan dan lembaga yang terkait dengan pelayanan publik juga dituntut untuk memiliki akuntabilitas.

Tiga pilar utama menjadi persyaratan terbangunnya akuntabilitas. Pertama, adanya transparansi dalam menetapkan kebijakan dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai institusi. Kedua, adanya standar kinerja yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang. Ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat. Tiga pilar utama akuntabilitas tersebut penting kiranya untuk dimiliki lembaga penyelenggaraan pendidikan sehingga pelayanan pendidikan bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (Soemidihardjo dalam MBS Nurkolis).

Dari fenomena tersebut di atas, Wilayah Cabang Dinas Kecamatan Pati, sebagai bagian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati sedang melakukan berbagai pembenahan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pendidikan di sekolah dasar. Peneliti mengangkat SD Negeri Pati Kidul 01 sebagai model sekolah dasar yang telah mengakuntabilitaskan penyelenggaraan pendidikan dasar kepada publik.

Masyarakat berhak ikut serta dalam pembangunan pendidikan, karena :

- 1) Rakyat adalah penyumbang utama sumber penerimaan anggaran (APBD) melalui pajak dan retribusi, 2) Rakyat merupakan target untuk disejahterakan melalui peningkatan pendidikan, 3) Amanah Konstitusi (pasal 23 UUD 1945) “rakyat berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran”, 4) PP 20 Tahun 2002 “masyarakat secara perseorangan maupun kelompok melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah

daerah, 5) Konvensi PBB tentang konsep Hak Asasi Manusia (HAM), 6) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 48 ayat 1 “pengelolaan pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisien, transparansi dan akuntabilitas publik” (Ramlah. [www.serambinews.com/index.php...](http://www.serambinews.com/index.php...))

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah “Bagaimana Akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan Pada SDN Pati Kidul 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati”

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna akuntabilitas dalam penyelenggaraan, serta faktor-faktor pendukung pada penyelenggaraan sekolah dasar yang unggul dan bermutu sebagai cerminan suatu pendidikan yang berkualitas.

### 2. Tujuan Khusus

Secara operasional, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengungkapkan sistem pembiayaan SD Negeri Pati Kidul 01 dalam penyelenggaraan pendidikan dasar;
- b. Untuk mengungkapkan / mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Pati Kidul 01.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
2. Manfaat Praktis

## **E. Daftar Konseptual**

Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dasar adalah suatu kewajiban sekolah dasar untuk menyampaikan pertanggung jawabannya dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / badan hukum atau pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawabannya